

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK  
MENDAPATKAN MAKANAN YANG LAYAK DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**DEDET GUSTIKA PUTRA**

**1410111034**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Nelwitis, S.H., M.H.**

**Rifi Afririzal, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

**No.Reg : 5264/PKIV/IV/2018**

# **PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN YANG LAYAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG**

*(Dedet Gustika Putra, 1410111034, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 59 Halaman, 2018)*

## **ABSTRAK**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana juga terkait dengan Hak Asasi Manusia. Salah satu hak yang wajib dipenuhi dan menjadi hak Narapidana adalah hak untuk mendapatkan makanan yang layak. Dalam pelaksanaan terdapat hambatan teknis seperti terjadinya kelebihan kapasitas sehingga mengakibatkan terjadi masalah kurangnya pelayanan dalam bidang kelayakan makanan. Penelitian ini dilakukan terhadap Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, Apa saja Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan sosiologis yuridis dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pelaksanaan di lapangan. Ada pun jenis data yang digunakan Primer, sekunder, dan data tersier dengan pendekatan analisis data kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan mendapatkan makanan yang layak belum optimal dan memadai. Sedangkan kendala dalam melaksanakan hak untuk mendapatkan makanan yang layak terhadap narapidana dan dalam hal pengelolaannya itu kurangnya petugas juru masak yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam pengetahuan memasak. Sedangkan juru masak yang bertugas adalah warga binaan itu sendiri yang tidak memiliki keahlian atau keterampilan dalam pengetahuan memasak. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan hak untuk mendapatkan makanan yang layak terhadap Narapidana serta tidak memadainya sarana dan prasarana dan lingkungan yang buruk dan tidak layak. Disamping dalam rangka keperluan memperjelas hukum pemasyarakatan juga berkaitan dengan upaya menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi Narapidana dan kualitas kelayakan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.